

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 05, Maret 2025

APBN dan Good Governance: Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan

p.4

Fenomena #KaburAjaDulu: Tantangan Pasar Kerja dan Solusi Kebijakan

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

APBN dan Good Governance: Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan

p.4

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan pilar utama dalam visi Indonesia Emas 2045. Selain faktor ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai instrumen fiskal utama, APBN memiliki peran strategis dalam memperbaiki efektivitas tata kelola pemerintahan. Optimalisasi APBN dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, penguatan sistem meritokrasi untuk meningkatkan independensi birokrasi, pembangunan pusat data terpadu guna memperbaiki kualitas formulasi kebijakan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan kebijakan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah. Dengan menerapkan strategi ini, APBN dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Badan Anggaran DPR RI memiliki peran krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, Badan Anggaran perlu memastikan bahwa anggaran diarahkan pada program berbasis outcome, meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas belanja negara, serta memperkuat stabilitas kebijakan fiskal agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Fenomena #KaburAjaDulu: Tantangan Pasar Kerja dan Solusi Kebijakan

p.9

Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan pekerja muda terhadap pasar kerja Indonesia. Meski proporsi usia produktif besar, banyak tenaga kerja terjebak di sektor informal dengan upah minim dan upah riil menurun tergerus inflasi. Kebijakan upah belum efektif mendorong perbaikan pendapatan, sementara itu deindustrialisasi mempersempit lapangan kerja formal. Di sisi lain, berbagai program pemerintah, seperti Kartu Prakerja belum signifikan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Reformasi regulasi ketenagakerjaan, insentif fiskal bagi industri padat karya, dan peningkatan inovasi diperlukan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal, dan talenta terbaik Indonesia tetap dapat berkarya di tanah air.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



Next on
Buletin APBN
Edisi 06

***Tantangan Bansos Lansia dalam
Mengurangi Kemiskinan***

***Mengoptimalkan Penanaman Modal Asing
dalam Mencapai Indonesia Emas 2045***

APBN dan Good Governance: Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan

Tio Riyono*)

Abstrak

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan pilar utama dalam visi Indonesia Emas 2045. Selain faktor ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai instrumen fiskal utama, APBN memiliki peran strategis dalam memperbaiki efektivitas tata kelola pemerintahan. Optimalisasi APBN dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, penguatan sistem meritokrasi untuk meningkatkan independensi birokrasi, pembangunan pusat data terpadu guna memperbaiki kualitas formulasi kebijakan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan kebijakan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah. Badan Anggaran DPR RI memiliki peran krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, Badan Anggaran perlu memastikan bahwa anggaran diarahkan pada program berbasis outcome, meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas belanja negara, serta memperkuat stabilitas kebijakan fiskal agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki visi besar menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan daya saing global yang kuat. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Berdasarkan berbagai proyeksi, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 8% per tahun secara berkelanjutan.

Target pertumbuhan yang tinggi tersebut merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Indonesia setelah Covid dinilai telah kehilangan momentum pemulihan (Yusuf, 2024). Hal ini akan memperberat langkah Indonesia ke depannya. Dampak pandemi tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat dan investasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi, memperlambat reformasi struktural, serta memperberat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan strategi pemulihan yang berkelanjutan guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dicapai hanya melalui faktor

ekonomi, faktor non-ekonomi, seperti kualitas institusi juga memainkan peran kunci dalam menentukan keberlanjutan pembangunan (Daron Acemoglu, 2012). Pemerintahan dengan kualitas institusi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pembangunan sosial. Selain itu, tata kelola yang baik juga berdampak pada efisiensi pengelolaan sumber daya, mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai instrumen fiskal yang krusial, APBN memainkan peran sentral dalam mendukung efektivitas pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Anggaran yang dialokasikan secara strategis dapat memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan layanan publik, serta memperbaiki kualitas kebijakan ekonomi.

Indonesia mengalami Revisi Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Lebih Besar Dibandingkan Rata-Rata Global

Indonesia mengalami revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi (*downward forecast revision*), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. IMF awalnya memproyeksikan

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Perkembangan (revisi) *growth forecast* IMF



Sumber: Yusuf, (2024).

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat yang relatif tinggi, namun seiring waktu bahkan hingga implementasi tahun anggaran, proyeksi tersebut mengalami penurunan yang semakin signifikan. Meskipun revisi proyeksi ini juga terjadi di banyak negara lain, namun gap untuk Indonesia lebih besar dibandingkan dengan rata-rata global (Yusuf, 2024).

Penurunan proyeksi pertumbuhan ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah belum berhasil mengatasi gangguan yang dapat menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi selama ini. Kualitas institusi dalam pemerintahan perlu menjadi bahan evaluasi ke depan sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor Non Ekonomi Menjadi Kunci Pengungkit Ekonomi

Pemahaman mengenai peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu temuan paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi. Penerima Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson, dalam penelitian *How Institutions Are Formed and Affect Prosperity*, membuktikan bahwa kemakmuran suatu negara sangat

dipengaruhi oleh kualitas institusi (The Nobel Prizes, 2024). Mereka menunjukkan bahwa negara dengan institusi inklusif, yang melindungi hak kepemilikan dan mendorong partisipasi ekonomi yang luas, cenderung lebih makmur. Sebaliknya, negara dengan institusi eksploitatif, yang hanya menguntungkan segelintir elit, cenderung tetap miskin. Pandangan ini juga diperkuat dalam buku mereka, *Why Nations Fail*, yang menjelaskan bagaimana kelembagaan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu indikator utama untuk menilai kualitas institusi adalah *Government Effectiveness*, yang dikembangkan oleh World Bank. Indikator ini mengukur efektivitas pemerintahan dalam berbagai aspek, seperti kualitas layanan publik, tingkat independensi birokrasi dari intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, serta kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Negara-negara dengan tingkat efektivitas pemerintahan yang tinggi terbukti memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat terhadap guncangan

eksternal serta mampu melakukan pemulihan ekonomi yang lebih cepat pascakrisis (Rodrik, 2008).

Berbagai studi menunjukkan bahwa *Government Effectiveness* memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan birokrasi yang efisien cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, daya tarik investasi yang lebih tinggi, serta efektivitas kebijakan yang lebih kuat (Rodrik, 2008).

Evans dan Rauch menemukan bahwa birokrasi yang profesional dan berbasis meritokrasi secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan serta stabilitas makroekonomi (Evans & Rauch, 1999). Selain itu, North menegaskan bahwa institusi yang kuat berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi biaya transaksi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat (North, 1990).

Dengan demikian, jelas bahwa faktor non-ekonomi, terutama kualitas tata kelola pemerintahan, memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi *Government Effectiveness* Indonesia dan Permasalahannya

Meskipun Indonesia memiliki kekuatan ekonomi terbaik (G20) namun skor *Government Effectiveness* Indonesia berada di urutan ke-60. Tertinggal jauh dari negara kawasan seperti Singapura (Ranking 1), Brunei (Ranking 22), dan Malaysia (Ranking 41).

Berdasarkan data World Bank bahwa negara yang memiliki *Government Effectiveness* tinggi mayoritas negara maju secara ekonomi (World Bank, 2024). Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia umumnya kesulitan meningkatkan kualitas institusi (Chaerani, 2023). Beberapa poin yang menjadi permasalahan selama ini sebagai berikut:

Pertama, dinamika Birokrasi Indonesia. Indonesia sudah menjalankan berbagai program yang memperbaiki kualitas birokrasi, Namun sayangnya perbaikan kualitas layanan publik yang sudah dilakukan pemerintah masih belum menyentuh ranah birokrasi yang fundamental (Prasojo, 2020). Selain itu, permasalahan birokrasi ialah masih tingginya tingkat korupsi yang menghambat efektivitas pemerintahan. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2023, Indonesia memperoleh skor 37, menempatkannya pada peringkat 99 dari 180 negara, jauh tertinggal dibandingkan Singapura (3), Malaysia (57), dan Vietnam (88) (Transparency International, 2025). Korupsi dalam birokrasi, seperti ini dapat berkontribusi terhadap rendahnya kualitas layanan publik.

Menurut laporan IHPS I 2024, potensi kerugian mencapai Rp13,66 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,55 triliun terkait dengan ketidakhematan dan ketidakefisienan pengelolaan anggaran (BPK, 2024). Selain itu, sepanjang 2023, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara yang sangat besar yaitu Rp114,8 triliun. Ini menunjukkan tingginya angka kerugian keuangan negara akibat dari *government effectiveness* yang rendah.

Alokasi APBN untuk reformasi birokrasi harus diiringi dengan transparansi, digitalisasi administrasi, serta pengawasan yang ketat, guna memastikan efektivitas birokrasi dalam mendukung pembangunan. Penguatan sistem *e-government* dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi inefisiensi birokrasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, anggaran juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM birokrasi melalui pelatihan kepemimpinan dan manajerial bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan adaptif.

Kedua, tingkat independensi birokrasi dari intervensi politik. Salah satu tantangan besar dalam efektivitas pemerintahan di

Indonesia adalah rendahnya independensi birokrasi terhadap intervensi politik. Untuk mengatasi hal ini, APBN dapat diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi ASN. Anggaran yang memadai perlu dialokasikan untuk penguatan sistem seleksi berbasis kompetensi, peningkatan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat publik, serta pengawasan ketat terhadap praktik politisasi birokrasi. Selain itu, insentif berbasis kinerja dapat diperkenalkan untuk memastikan birokrasi lebih berorientasi pada profesionalisme, bukan kepentingan politik.

Ketiga, kualitas formulasi kebijakan. Rendahnya kualitas formulasi kebijakan sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, lemahnya basis data dalam pengambilan keputusan, serta minimnya kapasitas analisis kebijakan di berbagai instansi pemerintahan. APBN dapat berperan dalam membangun kapasitas riset dan analisis kebijakan di sektor publik melalui pendanaan riset kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pengalokasian anggaran juga dapat digunakan untuk membangun pusat data terpadu guna memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir. Selain itu, investasi dalam penguatan peran *think tank* pemerintah dan kolaborasi dengan akademisi dapat membantu meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang lebih strategis dan efektif.

Keempat, kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan sering kali terganggu oleh perubahan regulasi yang tidak terduga serta lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. APBN harus diarahkan pada penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan kebijakan. Penguatan peran lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI melalui alokasi anggaran yang lebih besar dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan secara konsisten.

Rekomendasi:

Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan (*government effectiveness*) merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, terutama setelah momentum pemulihan ekonomi pascapandemi melemah. Faktor non-ekonomi, khususnya kualitas institusi, memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi investasi dan inovasi. Namun, indikator *Government Effectiveness* Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara kawasan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi kualitas birokrasi yang masih belum menyentuh aspek fundamental, rendahnya independensi birokrasi dari intervensi politik, lemahnya kualitas formulasi kebijakan, serta rendahnya kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Badan Anggaran DPR RI memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa alokasi APBN tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI perlu:

Pertama, mendorong peningkatan kualitas belanja negara, dengan memastikan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*), khususnya dalam reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kapasitas ASN;

Kedua, mengawasi agar anggaran yang dialokasikan untuk reformasi birokrasi benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan profesionalisme ASN, bukan sekadar menambah belanja pegawai tanpa dampak signifikan pada efektivitas pemerintahan.

Ketiga, memperkuat peran pengawasan terhadap efektivitas kebijakan fiskal, dengan memastikan bahwa setiap program yang didanai melalui APBN memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan anggaran serta penguatan mekanisme evaluasi belanja negara secara berkala.

Keempat, mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya, guna memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Kelima, Badan Anggaran DPR RI perlu memastikan adanya stabilitas kebijakan fiskal, dengan menghindari perubahan anggaran yang terlalu sering dan mendadak, yang dapat mengganggu implementasi kebijakan serta melemahkan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Badan Anggaran DPR RI dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, serta mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Pendalaman Hasil Pemeriksaan BPK Pada IHPS I Tahun 2024 Untuk Entitas Kementerian/Lembaga dan BUMN/Badan Lainnya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Chaerani, A. D. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-Negara Berpendapatan Rendah, Menengah, dan Tinggi. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Daron Acemoglu, J. A. R. (2012). *Why Nations Fail*. Crown Publishers. <https://ia801506.us.archive.org/27/items/NationsFailTheOriginsODaronAcemoglu/The-Origins-o-Daron-Acemoglu.pdf>.
- Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). *Bureaucracy and growth: a cross-national analysis of the effects of "Weberian" state structures on economic growth*. *American Sociological Review*, 64(5), 748–765.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/institutions-institutional-change-and-economic-performance/1E27DF8996E24C5DD07EB79BBA7EE>
- Prasojo, E. (2020). Reformasi Birokrasi Indonesia Hanya Sebatas Kulit, Belum Sampai ke Organ Dalam. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Rodrik, D. (2008). *Second-best institutions*. *American Economic Review*, 98(2), 100–104.
- The Nobel Prizes. (2024). *The Prize in Economic Sciences 2024 - Press release*. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2024/press-release/>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perception Index 2024. Transparency International 2025*. https://www.transparency.org/en/cpi/2024?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiaC-BhBEiWajY99qNXbHsHD99Vj6pRsyVWQJgrswX8aTqi1JP0RInDbqtGYgXpjjlY-wBoCHHoQAvD_BwE
- World Bank. (2024). *World Governance Indicator*. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Yusuf, A. A. (2024). Tumbuh Tapi Tidak Sejahtera? *Outlook Ekonomi 2025*. <https://www.youtube.com/watch?v=qMx0BREYgIA>, pada 3 Maret 2025.

Fenomena #KaburAjaDulu: Tantangan Pasar Kerja dan Solusi Kebijakan

Fachry Ali Firdaus*)

Abstrak

Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan pekerja muda terhadap pasar kerja Indonesia. Meski proporsi usia produktif besar, banyak tenaga kerja terjebak di sektor informal dengan upah minim dan upah riil menurun tergerus inflasi. Kebijakan upah belum efektif mendorong perbaikan pendapatan, sementara itu deindustrialisasi mempersempit lapangan kerja formal. Di sisi lain, berbagai program pemerintah, seperti Kartu Prakerja belum signifikan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Reformasi regulasi ketenagakerjaan, insentif fiskal bagi industri padat karya, dan peningkatan inovasi diperlukan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal, dan talenta terbaik Indonesia tetap dapat berkarya di tanah air.

Kemunculan dan Tren Tagar KaburAjaDulu (#KaburAjaDulu) pertama kali pada September 2023 dari interaksi pekerja sektor teknologi informasi (IT) di media sosial X (Twitter). Mereka membahas perbandingan remunerasi pekerja IT di luar negeri yang lebih menjanjikan dibandingkan di Indonesia (Adyatama, 2025). Tagar ini kembali ramai pada September 2024 dan memuncak pada pertengahan Januari 2025 (Muslim, Kusumaningrum, & Afriansyah, 2025). Tantangan yang dihadapi angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan layak menjadi isu utama dalam berbagai cuitan yang menggunakan tagar ini. Pengguna tagar didominasi oleh individu berusia 19–29 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif dan bagian dari bonus demografi yang idealnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan pekerja muda terhadap kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Munculnya tren ini menimbulkan pertanyaan utama mengenai faktor-faktor yang mendorong banyak pekerja muda untuk mencari peluang di luar negeri. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah bagaimana kondisi pasar tenaga kerja saat ini, terutama terkait dengan dominasi sektor informal, stagnasi upah, dan keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Banyak

pekerja, khususnya Generasi Z (Gen Z), menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan formal yang stabil dan memiliki prospek karir yang jelas.

Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian. Meskipun berbagai program seperti Kartu Prakerja telah diluncurkan, dampaknya terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan pekerja masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Sementara itu, fenomena deindustrialisasi, khususnya di sektor manufaktur, semakin memperburuk kondisi tenaga kerja. Berkurangnya jumlah lapangan kerja di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, menyebabkan semakin banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau terpaksa masuk ke sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah dan minim perlindungan sosial.

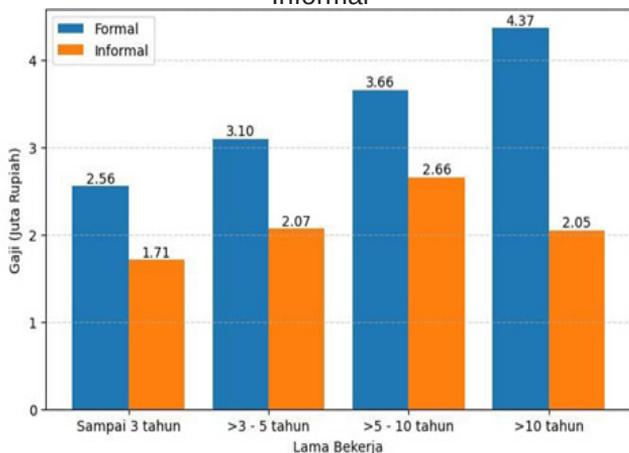
Kondisi Pasar Kerja di Indonesia

Pasar tenaga kerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, khususnya bagi generasi muda. Berbagai tantangan tersebut diantaranya:

Pertama, pekerja Indonesia Didominasi Sektor Informal. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri, pada Juni

*) *Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

Gambar 1. Perbedaan Gaji Pekerja Formal dan Informal



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah.

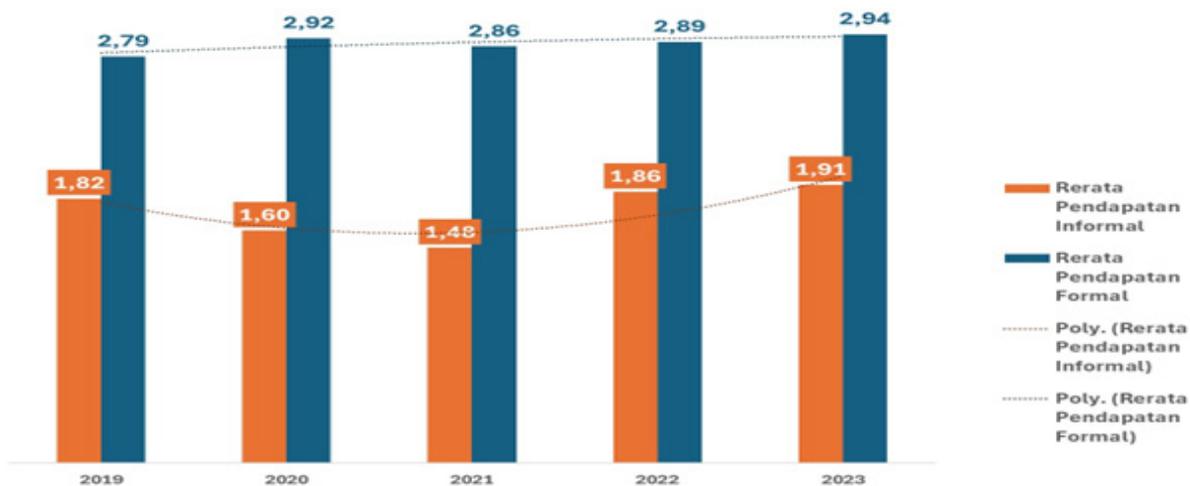
2024 penduduk Indonesia tercatat mencapai 282.477.584 jiwa. Kelompok usia produktif 15 – 64 tahun menjadi kelompok usia terbanyak sebanyak 196.558.195 jiwa atau 69.58% (Prasetyo, 2024). Dari jumlah tersebut, berdasarkan data Sakernas Februari 2024, jumlah angkatan kerja mencapai 149.38 juta orang, dengan jumlah orang yang bekerja mencapai 142.18 juta orang. Pekerja dengan status bekerja penuh waktu mendominasi struktur pekerja berdasarkan jam kerjanya, mencapai 63.8% di tahun 2023, diikuti pekerja paruh waktu sebanyak 26.6%, dan pekerja setengah menganggur sebanyak 9.6%.

Rasio angka pekerja penuh waktu yang tinggi tidak serta merta sebuah

pencapaian yang baik. Angka tersebut turun sekitar 7% dalam 5 tahun terakhir, di antaranya menunjukkan peran sektor informal yang semakin besar. Per Februari 2024, sebanyak 84,13 juta orang atau 59,17% dari total pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, sementara 58,05 juta orang atau 40,83% bekerja di sektor formal.

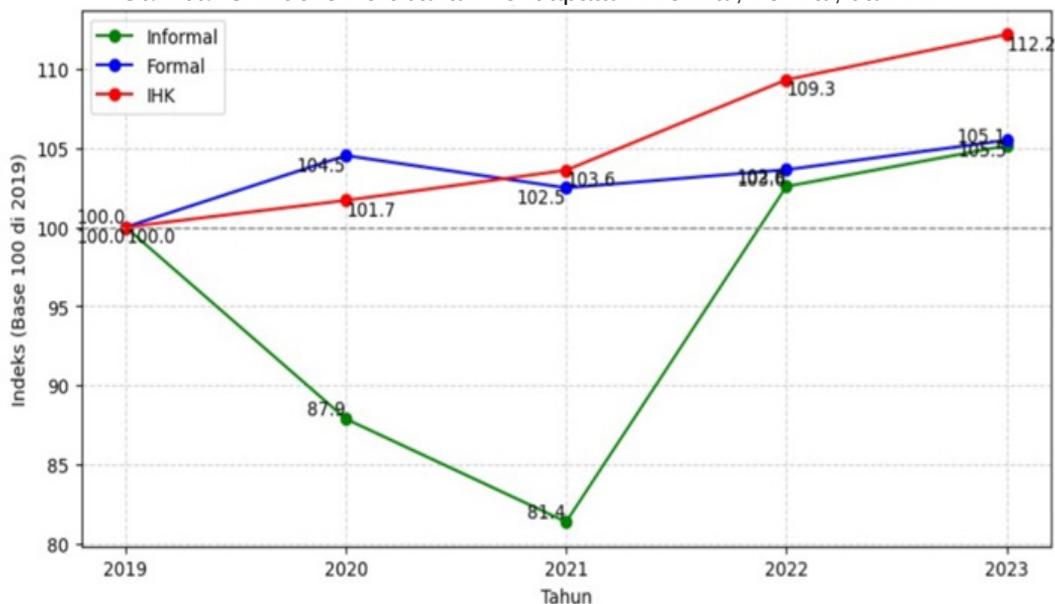
Kedua, pendapatan Pekerja Cenderung Stagnan. Rata-rata pendapatan pekerja informal diketahui lebih kecil dibandingkan pekerja sektor formal, baik dengan lama kerja yang sama maupun pada seluruh kategori pengalaman kerja (Mandiri Institute, 2024). Pada seluruh kategori lama kerja, pendapatan pekerja informal selalu lebih rendah antara 38% hingga 113% dibandingkan pekerja formal. Pekerja informal dengan lama kerja lebih dari 10 tahun selain disparitasnya dengan pekerja formal sangat tinggi, juga lebih rendah dibandingkan rerata pekerja informal dengan lama kerja yang lebih rendah. Fenomena tersebut dijelaskan oleh studi Rizky, Suryadarma, & Suryahadi (2020), yang menunjukkan pengalaman kerja pada sektor informal tidak berkorelasi positif dengan kenaikan upah, karena pekerja informal sering tidak memiliki akses ke pelatihan atau modal untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan keterampilan.

Gambar 2. Perkembangan Rata-Rata Gaji Pekerja Formal dan Informal Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah.

Gambar 3. Indeks Perubahan Pendapatan Informal, Formal, dan IHK



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah.

Ketiga, kesenjangan Pendapatan dan Inflasi. Hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah tingkat kenaikan pendapatan dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata tingkat pendapatan pekerja informal adalah Rp 1.816.386 per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp 1.909.700 per bulan pada 2024. Selama 5 tahun, rata-rata tingkat pendapatan pekerja informal hanya naik 5%. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan inflasi antara 5 tahun tersebut yang mencapai 14.4%, sehingga secara riil pendapatannya justru menurun. Rendahnya kenaikan upah ternyata juga dialami oleh pekerja sektor formal. Upah pekerja sektor formal di 2019 adalah sebesar Rp2.791.517 dan menjadi Rp2.944.541 di 2023, atau mengalami kenaikan sebesar 5.5%. Tidak jauh berbeda dengan tingkat kenaikan pendapatan pekerja informal, sehingga pekerja formal juga mengalami penurunan upah secara riil.

Belum Efektifnya Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Dan Perbaikan Pendapatan

Fenomena kenaikan pendapatan pekerja tidak sejalan dengan regulasi pemerintah terkait upah minimum. Kurang efektifnya kebijakan upah minimum dalam mendorong kenaikan pendapatan,

bahkan untuk sektor formal, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Rama (2001) menjelaskan bahwa kebijakan menaikkan upah minimum hanya efektif memberikan manfaat bagi pekerja di perusahaan skala besar. Sementara itu, pada usaha skala kecil dan menengah, kebijakan ini hanya diterapkan oleh sekitar 30% pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya seperti industri alas kaki dan tekstil. Kenaikan upah minimum yang tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas pekerja sering kali berakibat pada pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Fenomena deindustrialisasi, khususnya di sektor manufaktur, juga menjadi salah satu kegagalan kebijakan yang dampaknya sangat dirasakan di pasar tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pekerja di sektor-sektor padat karya seperti tekstil. Jumlah pekerja industri besar dan sedang pada tahun 2017 mencapai 6,6 juta orang, namun pada tahun 2021, setelah pemulihan dari Covid-19, jumlahnya turun menjadi 5,9 juta orang. Fenomena ini juga dikonfirmasi oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang menyatakan bahwa jumlah pegawai manufaktur sektor tekstil telah berkurang hampir 500 ribu orang dalam kurun lima

tahun hingga 2024 (Salasah & Sulitstyo, 2024). Angka tersebut kemungkinan lebih besar, terutama jika ditambah dengan fenomena PHK yang meningkat tajam pada awal 2025. Memburuknya kondisi pasar tenaga kerja di sektor manufaktur semakin memperburuk persepsi angkatan kerja usia muda, termasuk Gen Z, terhadap prospek karier di dalam negeri, terutama jika melihat tren daya serap tenaga kerja yang semakin rendah.

Jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya mencapai 3,5 juta orang (Kumparan, 2023). Di sisi lain, jumlah lapangan pekerjaan baru yang tercipta semakin sedikit. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2009, 2014, 2019, dan 2024 mengungkapkan tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode 2009–2014, sektor formal mampu menyerap 15,6 juta pekerja baru. Namun, angka ini menurun menjadi 8,5 juta pada 2014–2019, dan semakin merosot pada 2019–2024 dengan hanya 2 juta tenaga kerja yang terserap. Kondisi ini mencerminkan semakin sulitnya akses ke pekerjaan formal di Indonesia, termasuk bagi lulusan baru. Akibatnya, individu yang menyelesaikan pendidikan pada 2022 atau yang tergolong dalam Gen Z menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, seperti Generasi Y (Gen Y) atau Milenial (kelahiran 1981–1996), dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal (Wisanggeni, Rejeki, Widyastuti, & Krisna, 2024).

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia memang mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir. Namun, penurunan ini tidak terjadi secepat sebelumnya, terutama karena semakin sedikitnya peluang kerja di sektor formal. Misalnya, dalam periode 2009–2014, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun sebesar 2,44%. Tetapi pada periode berikutnya, 2014–2019, laju penurunannya melambat menjadi hanya 0,72%. Kondisi ini semakin terlihat pada 2019–2024, di mana penurunannya

hanya sebesar 0,16%. Di sisi lain, data dari BPS per Februari 2024 mencatat adanya peningkatan jumlah orang yang bekerja sebanyak 3,55 juta orang. Namun, jika diperinci, sebagian besar dari mereka masuk dalam kategori "setengah pengangguran," yaitu pekerja yang jam kerjanya rendah atau tidak bekerja penuh waktu, yang bertambah sebanyak 2,52 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja penuh waktu hanya bertambah 1,11 juta orang, sedangkan pekerja paruh waktu justru mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08 juta orang. Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun jumlah pekerja bertambah, banyak dari mereka yang tidak bekerja dalam kondisi ideal. Oleh karena itu, kualitas lapangan kerja yang tersedia juga patut menjadi perhatian. Ketidaksiharian antara harapan Gen Z terhadap pekerjaan berkualitas dan rendahnya penciptaan lapangan kerja formal menjadi salah satu pendorong utama fenomena #KaburAjaDulu.

Pekerjaan berkualitas menjadi penting karena merupakan salah satu parameter utama dalam kriteria pekerjaan yang dicari oleh Gen Z di Indonesia. Terdapat tiga parameter utama yang dicari oleh Gen Z dalam pekerjaan, yaitu remunerasi yang ideal, kesempatan mengembangkan karier, serta lingkungan dan budaya kerja yang mendukung (IDN Research Institute, 2024). Sayangnya, parameter yang diinginkan oleh Gen Z tersebut bertolak belakang dengan kondisi lapangan kerja informal di Indonesia saat ini, yang menawarkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan sektor formal. Idealisme Gen Z yang tinggi dihadapkan dengan realita pasar tenaga kerja dalam negeri yang sulit, sehingga mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jangkara dan Jakpat, ditemukan bahwa 74% Gen Z tertarik untuk mencari kehidupan baru di luar negeri, dengan 4% di antaranya telah mencoba mengirimkan lamaran (Raissa, 2024).

Berbagai program pemerintah yang diluncurkan dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas sektor

ketenagakerjaan dan UMKM memiliki nilai yang tidak sedikit. Beberapa di antaranya adalah Program Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kartu Prakerja, misalnya, dalam kurun waktu 2020–2024 memberikan manfaat bagi 7,25 juta orang dengan anggaran sekitar Rp28,14 triliun. Program lainnya, seperti KUR, memiliki nilai penyaluran yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya dan diarahkan untuk pengembangan UMKM yang juga diharapkan membantu perbaikan sektor ketenagakerjaan. Sayangnya, program-program tersebut belum efektif dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Financial Group pada tahun 2024 menemukan bahwa kenaikan 1% penyaluran KUR hanya berdampak pada peningkatan pengeluaran rumah tangga sebesar 0,3–1%, yang menunjukkan sifatnya yang inelastis. Hasil evaluasi Program Prakerja yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian pada tahun 2024 menemukan bahwa hanya 13% peserta yang mendapatkan pekerjaan dalam dua bulan dan 13% lainnya memulai usaha baru. Capaian ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan desain awal program serta anggaran yang dikeluarkan. Berbagai program tersebut, terutama yang dijalankan oleh kementerian teknis, tampaknya belum mampu secara efektif mendorong penciptaan lapangan kerja formal dan layak yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi

Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap pasar kerja Indonesia yang semakin tidak ideal. Bonus demografi seharusnya menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi tantangan seperti dominasi sektor informal, stagnasi upah riil, dan minimnya lapangan kerja baru perlu segera diatasi.

Menanggapi isu #KaburAjaDulu, Komisi IX DPR RI dapat mendorong reformasi ketenagakerjaan agar lebih adaptif

terhadap dinamika pasar, termasuk penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan pelatihan berbasis keterampilan industri. Komisi XI DPR RI dapat memperkuat insentif bagi industri padat karya dan UMKM untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan formal yang layak. Sementara itu, Komisi VII DPR RI dapat mendorong kebijakan inovasi dan investasi teknologi guna menyerap tenaga kerja berketerampilan tinggi dengan upah kompetitif. Sinergi kebijakan lintas sektor ini diharapkan membuat pasar tenaga kerja lebih inklusif dan meminimalkan eksodus talenta terbaik Indonesia untuk mencari peluang di luar negeri.

Daftar Pustaka

Adyatama, E. (2025, February 23). Dari Mana Tagar Kabur Aja Dulu Bermula? Diakses kembali dari Tempo: <https://www.tempo.co/arsip/kabur-aja-dulu-indonesia-gelap-1210818>, pada 3 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Indonesia. Diakses melalui: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=520>, pada 3 Maret 2025.

Datareportal. (2025, February). Global social media Statistics. Diambil kembali dari Datareportal: <https://datareportal.com/social-media-users>, pada 3 Maret 2025.

IDN Research Institute. (2024). Indonesia Gen Z Report 2024. IDN Media.

Kumparan. (2023, February). Ada 3,5 Juta Angkatan Kerja Baru Tiap Tahun, Pengusaha Akui Tak Bisa Serap Semua. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ada-3-5-juta-angkatan-kerja-baru-tiap-tahun-pengusaha-akui-tak-bisa-serap-semua-1ztKzUEh83P/3>, pada 4 Maret 2025.

Magruder, J. R. (2013). Can minimum wages cause a big push? Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, Volume 100, Issue 1.,

Mandiri Institute. (2024). Sektor Informal: Realitas dan Tantangan. Mandiri Institute.

- Muslim, F., Kusumaningrum, D. D., & Afriansyah, A. (2025, February). Tren #KaburAjaDulu: Peringatan bagi pemerintah sebelum kehilangan generasi berkualitas. Diambil kembali dari TheConversation: <https://theconversation.com/tren-kaburajadulu-peringatan-bagi-pemerintah-sebelum-kehilangan-generasi-berkualitas-250277>, pada 4 Maret 2025.
- Muttaqien, A. (2024, 09 13). "Gig Economy" atau Kelas Pekerja Informal. Diambil kembali dari Kompas: <https://money.kompas.com/read/2024/09/13/155422926/gig-economy-atau-kelas-pekerja-informal?page=all>, pada 4 Maret 2025.
- Prasetyo, W. (2024, August). Dirjen Dukcapil: Penduduk Produktif 69,58%, Modal Besar Menuju Indonesia Emas. Diambil kembali dari KumparanNews: <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-dukcapil-penduduk-produktif-69-58-modal-besar-menuju-indonesia-emas-23HuXW4TpQW/full>, pada 3 Maret 2025.
- Raissa, A. (2024, August). Gambaran Indonesia Menyongsong Bonus Demografi: Gen Z ke Luar Negeri, Gen Alpha Bersiap Pergi. Diambil kembali dari Deduktif.id: Gambaran Indonesia.
- Rama, M. (2001). The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia. *ILR Review*, 54(4), 864–881.
- Rizky, M., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). Progress and stagnation in the livelihood of informal workers in an emerging economy.
- Salasah, R., & Sulitstyo, D. P. (2024, February). Indonesia's Middle Class Finds It Hard to Get Rich, Affected by the Collapse of the Manufacturing Industry. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/27/en-kelas-menengah-sulit-kaya-terdampak-efek-domino-tumbangnya-industri-padat-karya>, pada 4 Maret 2025.
- Syafri, A. F. (2025, January 30). UMKM Berkelanjutan Kunci Masa Depan Ekonomi Indonesia. Diambil kembali dari Perbanas institute: <https://perbanas.id/2025/01/30/umkm-berkelanjutan-kunci-masa-depan-ekonomi-indonesia>, pada 5 Maret 2025.
- Wisanggeni, S. P., Rejeki, S., Widyastuti, R. S., & Krisna, A. (2024, Mei 20). Generasi Z Lebih Susah Cari Kerja. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/05/13/generasi-z-lebih-susah-cari-kerja-1>, pada 3 Maret 2025.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

